

TINJAUAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN TENGAH INDONESIA

Putri Auliah Azani¹, Abd. Hamid Paddu², Indraswati T.R³

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, putriauliah10@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, hamidpaddu@gmail.com

³Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, triabdi85@gmail.com

E-mail Korespondensi: putriauliah10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Fiscal Capacity, Investment and Human Resources indirectly on regional inequality through economic growth in South Sulawesi Province. This study uses a quantitative approach. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The data used is time series data for 2000-2021 in South Sulawesi Province. The analytical method used is the TSLS (Two Stage Least Square) regression analysis method using the Amos program. The results of this study are 1) Fiscal Capacity has a negative and insignificant effect on regional inequality through economic growth, 2) Investment has a positive and significant effect on regional inequality through economic growth, 3) Human resources has a positive effect on regional inequality through economic growth.

Keywords: Fiscal Capacity, Investment, Human Resources, Economic Growth, Regional Inequality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kapasitas Fiskal, Investasi dan Sumber Daya Manusia secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan yaitu data time series tahun 2000-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi TSLS (Two Stage Least Square) dengan menggunakan program Amos. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kapasitas Fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi, 2) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi, 3) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Investasi, Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah

PENDAHULUAN

Pada umumnya proses pembangunan di suatu wilayah ada dua hal yang harus sejalan dan dicapai secara bersamaan yakni, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (kaya dan miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (maju dan tertinggal) yang disebut sebagai suatu ketimpangan. Fenomena ketimpangan disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumberdaya alam dan kondisi geografis yang berbeda-beda pada setiap wilayah. (Cavanaugh & Breau, 2018; Eva et al., 2022; Marlyn, Nursini et al., 2024). Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cukup mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam banyak hal relatif belum mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah (Anas Iswanto Anwar, 2020). Kompetensi profesional seseorang bergantung pada akses dan penerimaan pelatihan formal dalam manajemen, kepemimpinan, manajemen pendidikan, manajemen penelitian, budaya organisasi, strategis, perencanaan, dan manajemen waktu (Madriz, 2024)

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Nawir, 2020; Saidy., Amri et al., 2024). Salah satu wilayah yang menunjukkan pembangunan ekonomi yang cukup baik adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut tercermin dalam laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2021 yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi yakni di atas rata-rata Nasional yaitu sebesar 4,65 persen, sementara pertumbuhan ekonomi secara Nasional hanya sebesar 3,70 persen. Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 27,2%. Kabupaten Maros merupakan enam daerah dengan persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan prevalensi stunting sebesar 11,1% (Agus, 2024).

Walaupun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong cukup baik, namun nyatanya Provinsi ini termasuk ke dalam sepuluh provinsi yang memiliki ketimpangan terbesar di (Emily Nur Saidy, 2024) (Emily Nur Saidy, 2024) Indonesia. Gambaran ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan atau dilihat dari bentuk perkembangan PDRB Perkapita antar Kabupaten/Kotanya. Perlu diketahui, terdapat perbedaan PDRB Perkapita

antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2021, dimana daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkep memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja. Katokkon merupakan salah satu varietas cabai asli yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di Indonesia, terdapat jenis penyakit baru yaitu penyakit busuk pangkal batang (Base Akar Bakteri/BBB) yang disebabkan oleh bakteri *Burkholderia Glumae* dan telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan (Fatmawati., 2021). Dua kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi ini adalah Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Jeneponto (Gita Susanti., 2023). Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar saat ini sedang meningkat pesat, hal ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi (Muhammad Jibril Tajibu, 2021).

Untuk mengatasi adanya ketimpangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah), dimana daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sehingga daerah tersebut akan mampu melaksanakan pembangunan daerahnya semaksimal mungkin dan diharapkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri sebaik-baiknya serta pelaksanaan pembangunan antar daerah semakin berimbang. Inklusi keuangan adalah penggunaan dan aksesibilitas layanan keuangan formal, dan elemen pentingnya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan (Anas Iswanto Anwar, 2024). Untuk melihat gambaran keuangan di suatu daerah, maka dapat tercermin dari kapasitas fiskalnya. Pada dasarnya, kapasitas fiskal berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah. Hal yang juga dianggap dapat berperan dalam pengentasan masalah ketimpangan melalui dukungan terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Menurut Sukirno (2004), penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, maka tenaga kerja dapat diserap lebih banyak, sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Harahap, 2022). Investasi merupakan salah satu pilar utama penting pembangunan ekonomi (Fitrianti, 2015). Salah satu bentuk investasi adalah pembentukan modal tetap bruto, dimana PMTB atau investasi fisik merupakan besaran penambahan dan pengurangan barang modal tetap untuk kebutuhan produksi pada suatu aktivitas ekonomi pada periode tertentu. Alokasi anggaran untuk

daerah penanaman modal akan meningkatkan stok modal daerah dan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan kapasitas perekonomian daerah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Paddu, 2017). Bagi negara-negara maju, pasar saham lebih mungkin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pengembangan pasar saham dapat memenuhi permintaan layanan keuangan tingkat lanjut (Song dan Thakor, 2010; Razak et al., 2023)

Adapun sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Berbicara mengenai tenaga kerja, apabila jumlah tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia semakin banyak, maka untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang ada di suatu daerah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Muhlis, 2019). Air limbah merupakan salah satu sumber polutan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air secara signifikan pada badan air seperti sungai, waduk, dan danau (Fatmawati, 2020). Pemasaran Hijau mempromosikan jenis obligasi hijau sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan (Sabbar Dahham Sabbar, 2023). Konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non makanan di negara maju masih stagnan dan tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan negara berkembang (Fatmawati., 2022). Kelompok Rumah Tangga saat ini menjadi konsumen terbesar konsumsi listrik di beberapa negara terutama sejak pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua aktivitas dilakukan di rumah, seperti sekolah, kantor, dan aktivitas lainnya (Tajibu, 2021)

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan yakni, bagaimana pengaruh kapasitas fiskal terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama untuk mengetahui kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sektor di daerah tersebut (Anas Iswanto Anwar, 2020). Hasil studi perbandingan memperkirakan perolehan manfaat antara skenario proses liberalisasi perdagangan (REVIANE, 2017). Penelitian ini memberikan beberapa sumbangan secara

teoritis dan praktis (Kasneny Karim, 2022). Lingkungan kerja yang menyenangkan akan membantu karyawan merasa nyaman (Madris, 2024)

Berbicara ketimpangan wilayah, hal tersebut dimunculkan oleh Douglas C North dalam teori terkait pertumbuhan neo klasik membentuk persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori tersebut membahas dugaan terkait kaitan antara ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi nasional. Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Thofan, 2019). Terdapat juga teori lain yang berbicara mengenai ketimpangan dalam ekonomi, yaitu teori yang dikemukakan oleh Kuznet bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik (Yusuf, 2018). Keterkaitan yang kompleks antara desentralisasi fiskal, pembangunan keuangan, dan emisi karbon baru-baru ini menarik minat akademis yang cukup besar dalam bidang ekonomi dan studi lingkungan (Tufail et al., 2021; Hamid et al., 2024). Dari perspektif industri, impor peralatan dapat menjadi hambatan bagi kemajuan sektor manufaktur peralatan listrik lokal karena negara tersebut mungkin memerlukan waktu untuk membangun kapasitas peralatan yang diproduksi secara lokal (Indraswati et al., 2024).

Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi ialah menggambarkan keadaan dimana suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi, dimana barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan dapat mencapai taraf kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi. Metode seri LA-U umumnya memberikan estimasi usia dengan kesalahan yang lebih besar daripada metode berbasis larutan, tetapi dapat menghasilkan usia minimum yang benar-benar lebih tua untuk seni karena bahan kalsium karbonat yang lebih dekat ke lapisan pigmen dapat dianalisis (Hamrullah., 2024). Kawasan industri adalah kawasan yang dikategorikan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. (Madris, 2021)

Salah satu hal yang dianggap dapat mendukung proses pembentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah adalah adanya otonomi daerah. Hal tersebut dianggap dapat memacu suatu daerah untuk berupaya dalam menggali potensi sumber-sumber alam yang ada, sehingga mendorong tercapainya kenaikan pendapatan daerah serta peluang kerja juga terbuka yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Kriteria untuk

mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya atau daerahnya dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, dimana faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Konsep Musgrave (1980) dalam Sumarsono (2009) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah terdapat beberapa variable yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah kapasitas fiskal, dimana kapasitas fiskal menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Pada dasarnya, kapasitas fiskal berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah. Pengembangan sektor keuangan sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara-negara E7 karena memungkinkan pinjaman berbunga rendah diberikan kepada bisnis dan rumah tangga (Anas Iswanto Anwar., 2022). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi penggunaan dana dalam perekonomian, di samping membantu kelancaran arus dana melalui jasa sistem pembayaran. Kondisi ini seharusnya dapat membuat perbankan syariah menguasai pasar di Indonesia, namun pada kenyataannya tidak demikian. (Kasneny Karim, 2022). Karena peran strategis bahan bakar dalam perekonomian Indonesia, dampak fluktuasi harga bahan bakar bervariasi. (Tajibu, 2019)

Dengan adanya PAD yang meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah juga akan mengalami peningkatan, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potens-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Tambunan 2006, Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri (Rori, 2016). Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem yang sehat, mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekologi (Darmi et al., 2023).

Pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak lepas dari adanya investasi atau kegiatan penanaman modal. Menurut (Sukirno, 2015), Investasi di definisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal, dimana pembelian barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Bawinti, 2018). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat menjadi salah satu

indikator untuk melihat investasi dan ketersediaan modal di suatu wilayah. Investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal dalam kebutuhan produksi pada suatu aktivitas ekonomi pada periode tertentu yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Keunggulan investasi asing, liberalisasi ekonomi, manufaktur industri, dan peningkatan teknis tidak dapat disangkal (Beddu et al., 2022; Hamid et al., 2024). Pertumbuhan sektor pertanian dihitung dengan cara mengurangi nilai PDB Sektor Pertanian atas dasar harga konstan 2010 tahun t dengan nilai tahun $t-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai PDB Sektor Pertanian tahun $t-1$ dikalikan 100%, sehingga hasilnya dinyatakan dalam satuan persen. Data pertumbuhan ekonomi pertanian bersumber dari Badan Pusat Statistik. Informasi geospasial merupakan terobosan dalam revolusi informasi dan berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan (Fatmawati., 2021).

Salah satu teori yang telah dikembangkan dan menjelaskan mengenai investasi ialah teori Harrod-Domard, dimana teori ini menjelaskan bahwa kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian, dimana dengan adanya investasi, maka kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Dengan bertambahnya kapasitas barang modal, maka permintaan agregat juga haruslah bertambah. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan demikian, untuk menjamin suatu pertumbuhan ekonomi yang teguh, maka investasi harus terus-menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016). Pratama dan Utama (2019) juga menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempunyai kemampuan menurunkan angka kemiskinan adalah investasi karena mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratama et al., 2019; Nursini et al., 2022). Estimasi yang tepat diperlukan untuk mengukurnya. Beberapa penelitian sebelumnya sepakat bahwa pengangguran siklis dapat diperkirakan dengan mengurangi tingkat pengangguran aktual dari tingkat pengangguran alami atau Tingkat Pengangguran Inflasi Non-Akselerasi (NAIRU) (Martín-Román et al., 2023; (Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, 2024)

Adapun sumber daya manusia (*human resource*) yang merupakan faktor penting dan berperan sebagai penggerak dalam perekonomian untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Dalam teori salah satu ekonom klasik, yaitu Jean Baptiste Say (1767-1832) juga berpendapat bahwa peningkatan produksi akan diiringi dengan peningkatan pendapatan, apabila usaha peningkatan produktivitas diimbangi juga dengan peningkatan input faktor produksi tenaga

kerja (Idris, 2016). Dengan demikian, sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, Adapun yang disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ialah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu. Apabila jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja semakin besar, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang dimana akan mengakibatkan semakin kecil TPAK. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Hasil studi perbandingan memperkirakan perolehan manfaat antar skenario proses liberalisasi perdagangan (REVIANE, 2017). Ekowisata ditawarkan setelah pariwisata tradisional mengalami penurunan kunjungan dan berdampak pada kinerja pariwisata. (Madris, 2019). Model Fei-Ranis melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam perluasan sektor industri. (Madris, 2018). Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak potensi sumber daya alam kelautan. (Rauf, 2016). Rumah tangga dengan lebih banyak anggota membutuhkan lebih banyak ruang untuk tidur, makan, dan bersantai (Mubarak, 2024). Populasi adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar pasar hewan Bolu, Kabupaten Toraja Utara. (Saudi, 2024). Tedong Bonga, sejenis kerbau yang tubuhnya belang-belang baik yang banyak maupun yang sedikit. (Saudi, 2019). Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan terpenting dalam kehidupan sosial mereka. (Saudi, 2022). Di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, usaha mikro lebih dominan daripada usaha kecil dan menengah dalam hal jumlah unit, tenaga kerja, dan hasil (Nursini, 2020). Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar pula kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pelayanan publik. (Nursini, 2019). Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik, namun memberikan pengaruh tidak langsung melalui produktivitas (Fattah, 2017). Telur ayam agribisnis sebagai pemasok telur ayam mempunyai peluang usaha yang menguntungkan dan terus berkembang karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan telur ayam (Nurbayani, 2020). Meskipun terdapat kemajuan ekonomi dan sosial, korupsi masih menjadi tantangan di sektor publik Indonesia (Suhab, 2024). Artinya, semakin besar kekuatan pemangku kepentingan, semakin besar pula peluang mereka untuk memengaruhi pencapaian tujuan rencana di ruang public (Suhab, 2022). Subsidi pupuk yang berlaku saat ini merupakan subsidi harga, dimana dana

subsidi diberikan kepada pabrik pupuk (Suhab, 2021). Potensi keterbatasan IPSAS, terutama di negara kurang berkembang, ditangani (Suhab, 2020). Perencanaan pertanian merupakan bagian dari perencanaan publik karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (Suhab, 2021). Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan bukti adanya kesetaraan dalam pembangunan. (Siswadharna, 2021). Gula aren sangat cocok untuk dikembangkan karena merupakan produk alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat. (Djam'an, 2023). Potensi tanaman aren di Indonesia berdasarkan data adalah seluas 60.482 ha, dengan produksi gula aren mencapai 20.376 ton/tahun (Djam'an, 2021). Nilai ekonomi yang dihasilkan dari pabrik gula sangat besar di pasar internasional (Djam'an, 2021). Pariwisata merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mereka yang terlibat. (Rahmatia, 2024). Keuntungan dari pendekatan sistem adalah input yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan atau target dalam mengelola rekam medis dapat dirinci dengan jelas. (Rahmatia, 2024). Jumlah kasus tersebut diperoleh dari penelitian di beberapa rumah sakit di Indonesia, Jerman, Malaysia, dan Portugal dengan meninjau catatan medis dan data yang juga diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Rahmatia, 2023). Kemampuan membayar dan kemauan membayar merupakan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan jasa (Rahmatia, 2020). Pembangunan Manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, merupakan salah satu dari tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Rahmatia, 2020). Sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan peserta didik sangat dibutuhkan dalam membangun dan mengelola lingkungan, khususnya di lingkungan perkotaan (Rahmatia, 2020). Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu (Rahmatia, 2020). Sampah di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diatasi secara tuntas hingga saat ini (Rahmatia, 2019). Ketatnya persaingan antar rumah sakit menuntut rumah sakit untuk melakukan peningkatan mutu dengan tujuan agar rumah sakit tidak kehilangan pelanggan dan memiliki keunikan dalam hal pemberian layanan kepada pelanggan (Rahmatia, 2018). Petani cenderung meninggalkan produksi padi sawah apabila tidak ada dukungan lingkungan pertanian yang diharapkan (Mangilep, 2015). Agroforestri yang menggunakan beberapa pohon seperti pohon leguminosa dan "Tithonia Diversifolia" efektif untuk memasok nitrogen ke dalam tanah (Mangilep, 2017). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi padi terpenting di Indonesia (Mangilep, 2017). Sekitar 70% penduduk

Indonesia adalah petani, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh sektor pertanian (Mangilep, 2015). Wilayah pesisir di bagian selatan Pulau Sulawesi sebagian besar masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di pulau tersebut (Mangilep, 2024). Sampah merupakan masalah yang dialami hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia sehingga tidak heran jika dikatakan sampah menjadi masalah nasional (Mangilep, 2023). Gagasan bahwa investasi asing dapat membantu negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor mereka telah dipertanyakan baru-baru ini oleh beberapa ekonom (Mangilep, 2021). Dengan mengukur dampak variabel teknologi dan non teknologi terhadap penghasil pendapatan, pebisnis wanita dapat dibantu menentukan strategi mereka untuk meningkatkan pendapatan (Mangilep, 2021). Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan yang membutuhkan dana yang tersedia (Mangilep, 2019). Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan PDRB (Mangilep, 2019). Namun peran transportasi laut sebagai transportasi penumpang telah menurun dalam 2 dekade terakhir ini (Mangilep, 2019). Di Provinsi Sulawesi Selatan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam perluasan kesempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif (Mangilep, 2022). Sayangnya, beragamnya keindahan berbagai tempat wisata bahari di Indonesia masih belum dibarengi dengan akses promosi dan keamanan yang merata (Mangilep, 2024). Makassar merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dan terkenal dengan kondisi pengelolaan sampahnya yang unik dan seringkali penuh tantangan (Samir, 2024). Benih merupakan salah satu faktor yang diharapkan memiliki peranan penting dalam peningkatan produksi petani di Indonesia yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan petani serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan sosial (Samir, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan kebutuhan masing-masing sektor di daerah tersebut (Amanus Khalifah fil 'Ardy Yunus., 2020). Todaro (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja atau jumlah penduduk yang lebih besar akan menambah jumlah angkatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja yang lebih besar tersebut maka akan menambah tingkat produksi karena produktivitasnya juga meningkat serta

penduduk yang lebih besar akan mengubah ukuran pasar domestiknya menjadi lebih besar. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi pula. Dengan demikian, dengan adanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat berarti tingkat kemakmuran masyarakat juga mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut akan mendorong perekonomian suatu daerah. Urgensi perencanaan pembangunan yang responsif gender sangat dibutuhkan mengingat pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan dana yang sangat besar bagi desa dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa (Agussalim, 2020).

Azhari, dkk (2020) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas wilayah dan rasio efisiensi wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Meyvi Rine Mirah, dkk (2020) yang meneliti tentang pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*) yang merupakan perluasan dari analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Laki laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi juga TPAK laki-laki dan perempuan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun Erni Panca Kurniasih (2013) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Provinsi Kalbar. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear menggunakan data panel tahun 2001–2010. Adapun hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan wilayah, begitupun sebaliknya. Temuan lainnya membuktikan bahwa hipotesis Kuznet tentang pertumbuhan yang tinggi diiringi juga dengan ketimpangan yang tinggi antar wilayah ternyata tidak berlaku di Provinsi Kalbar.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sisca Vaulina dan Limetry Liana (2015) yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Riau. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terletak pada Kuadran I, kemudian berdasarkan perhitungan indeks Williamson, Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki ketimpangan dengan kisaran 0,727-0,960. Sedangkan berdasarkan indeks

Entropi Theil, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks 0,204

Selain itu, terkait pertumbuhan ekonomi, Ririhena dan Maro (2018) juga meneliti tentang bagaimana pengaruh dari investasi pada lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (*path analysis*) dan *sobel test*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka lapangan pekerjaan juga akan meningkat serta investasi tidak mempengaruhi lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

METODOLOGI KAJIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh kapasitas fiskal, investasi dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2021. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series tahun 2000 hingga tahun 2021 yaitu data PDRB atas dasar harga konstan, PDRB perkapita, Jumlah Penduduk masing-masing Kabupaten/Kota, realisasi kapasitas fiskal berupa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data atau analisa untuk mendapatkan informasi melalui beberapa catatan, literatur, buku serta berbagai laporan yang berkaitan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang

akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tidak langsung melalui variabel perantara. Variabel independen pada penelitian ini adalah kapasitas fiskal, pembentukan modal tetap bruto, dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel intervening atau perantara dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas antar wilayah, seperti antar wilayah dalam suatu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dalam Negara, maka digunakan metode Indeks Williamson. Dasar perhitungan indeks ini adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk pada masing-masing daerah. Syafrizal (1997) dalam Razak (2009), Adapun formulasi yang digunakan dalam Indeks Williamson ialah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum=(Y_i-Y)^2 \times \frac{F_i}{n}}}{Y}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB Perkapita di Kabupaten i

Y : PDRB Perkapita rata-rata seluruh

Kabupaten/Kota F_i : Jumlah penduduk di Kabupaten

n : Jumlah penduduk Provinsi j

Untuk melakukan pengujian apakah variabel independen (kapasitas fiskal, investasi, dan sumber daya manusia) berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel intervening (pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (ketimpangan wilayah) di Provinsi Sulawesi Selatan, maka digunakanlah alat analisis regresi linier berganda 2SLS (*Two Stage Least Square*). Adapun model analisis data berdasarkan pada kerangka penelitian, yaitu sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3) \tag{3.1}$$

$$Y_2 = f(Y_1) \tag{3.2}$$

Fungsi 1 dan 2 kemudian di transformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$e_{Y1} = X_2 \alpha_2 + e_{\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_3 X_3 + \mu_1} \tag{3.3}$$

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 Ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1 \tag{3.4}$$

$$e^{Y_2} = e^{\beta_0 + \beta_1 Y_1 + \mu_2} \tag{3.5}$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \mu_2 \tag{3.6}$$

Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan 3.4 dan 3.6 ke dalam persamaan 7 maka akan diperoleh persamaan *reduced form* sebagai berikut:

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1) + \mu_2$$

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_1 \alpha_0) + (\beta_1 \alpha_1) X_1 + (\beta_1 \alpha_2) \ln X_2 + (\beta_1 \alpha_3) X_3 + (\beta_1 \mu_1 + \mu_2)$$

$$Y_2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 \ln X_2 + \delta_3 X_3 + \mu_3$$

Dimana:

X₁ = Kapasitas Fiskal

X₂ = Investasi

X₃ = Sumber Daya Manusia

Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi

Y₂ = Ketimpangan Wilayah

δ₀, α₀, β₀ = Intercept

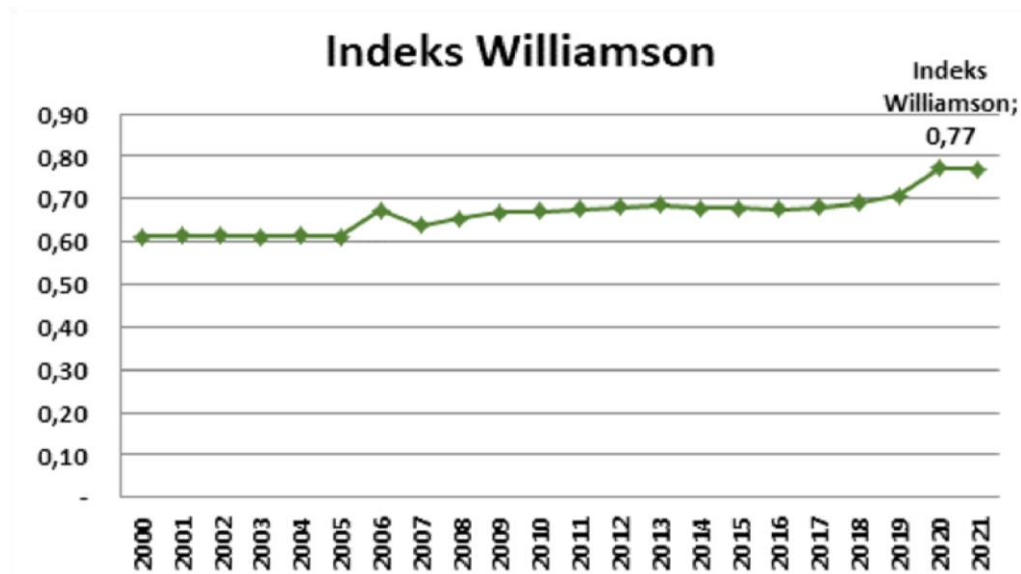
α₁, α₂, α₃, β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien Regresi

μ = Error Term

δ₁, δ₂, δ₃ = Parameter yang akan diestimasi

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana Indeks Williamson digunakan untuk melihat kecenderungan kesenjangan atau ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila nilai indeks Williamson semakin mendekati nol, maka tingkat ketimpangannya semakin kecil, sedangkan apabila semakin mendekati satu berarti tingkat ketimpangannya semakin tinggi. Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan, dari tahun 2000 sampai 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data diolah

Gambar 1

Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021

Pada gambar di atas menunjukkan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi selama 22 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2000 sampai 2021 rata-rata sebesar 0,67 dan cenderung mengalami peningkatan, dimana angka Indeks Williamson pada tahun 2000 sebesar 0,61 kemudian pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,77. Pada tahun 2006 ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sudah berada pada angka 0,67. Begitupun, selama tiga tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ketimpangan wilayah terlihat mengalami peningkatan yang cukup tajam, dimana angka Indeks Williamson di tahun 2019 hingga 2021 mencapai kisaran 0,7 hal ini sebagai dampak dari adanya Pandemi *Covid-19* yang walaupun di tahun 2021 mengalami penurunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 22 tahun terakhir termasuk dalam kategori ketimpangan yang tinggi karena angka Indeks Williamson berada diatas 0,5.

Untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal, investasi dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan analisis regresi linear secara simultan yang mengukur dan mengestimasi besarnya pengaruh tidak langsung. Variabel endogen dalam regresi linear secara simultan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dan Ketimpangan Wilayah (Y2), sedangkan variabel eksogen yaitu Kapasitas Fiskal (X1), Investasi (X2), dan Sumber Daya Manusia (X3) dengan data hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Penelitian

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	t-statistik	Probabilitas	R-Square
X1 → Y1	0.000	-3.333	0.739	0.978
X2 → Y1	0.663	29.840	0.000	
X3 → Y1	0.013	5.639	0.000	
Y1 → Y2	9.326	7.580	0.000	0.732

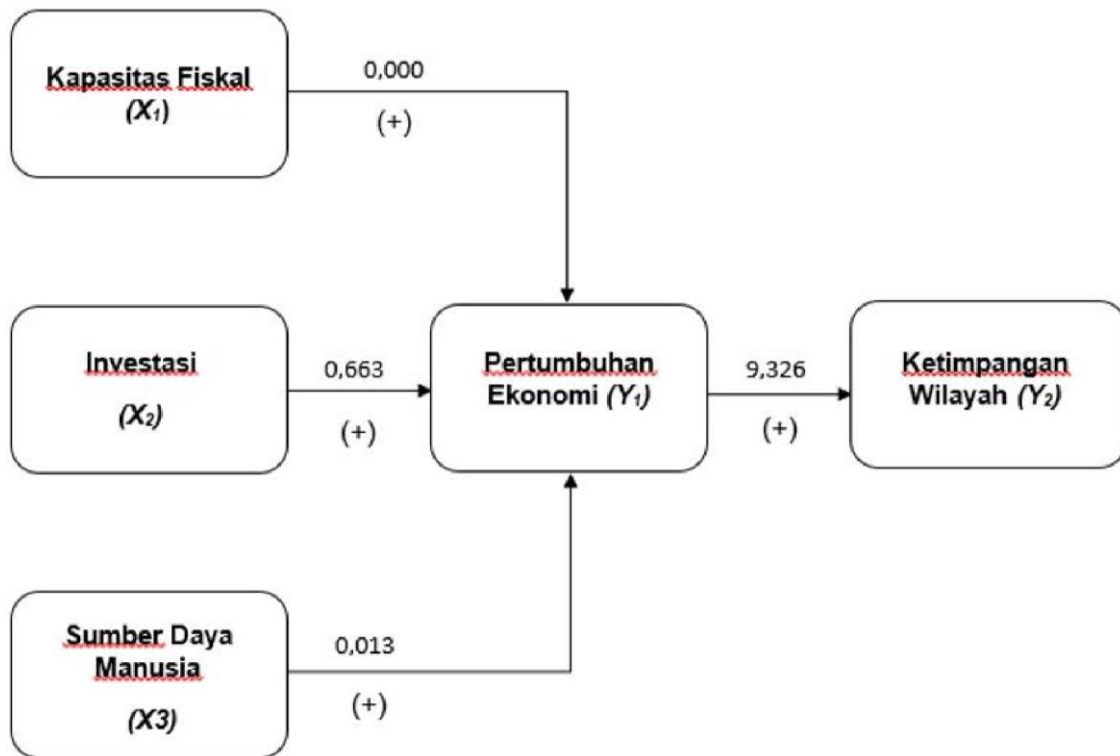
Sumber: Hasil Olahan Data Amos, 2023

Berdasarkan analisis regresi linear secara simultan yang ditunjukkan melalui **Tabel 1**, diperoleh nilai R Square sebesar 0,978 yang berarti 97,8 persen variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel kapasitas fiskal, investasi dan sumber daya manusia. Sementara itu, sisanya sebesar 2,2 persen ditentukan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Pada **Tabel 1** juga dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square Ketimpangan Wilayah yaitu sebesar 0,732 atau apabila dikonversi ke dalam persen yakni sebesar 73,2 persen. Hal ini berarti bahwa sebesar 73,2 persen perubahan ketimpangan wilayah dapat dijelaskan oleh. Variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, sisanya sebesar 26,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model penelitian ini.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, dimana angka tersebut lebih kecil dari nilai taraf $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan nilai koefisien sebesar 9,326. Artinya, adanya peningkatan atau kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan wilayah mengalami kenaikan sebesar 9,326. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka

diperoleh hubungan antara setiap variable yang dapat juga dilihat pada sebuah kerangka analisis sebagai berikut:



Gambar 2
Bagan Kerangka Hasil Penelitian

Dari began tersebut diketahui bahwa variable yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan adalah Kapasitas Fiskal yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dan nilai probabilitas sebesar 0,739 yang lebih besar dari nilai taraf $\alpha = 5\%$ (0,05).

Adapun variabel investasi yang diukur dengan menggunakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan sumber daya manusia yang diukur dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas masing-masing 0,000 dan 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05. Adapun koefisien regresi dari variabel investasi adalah sebesar 0,663 yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan satu persen investasi (PMTB) maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,663. Kemudian, koefisien regresi dari variabel sumber daya manusia (TPAK) menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan satu

persen sumber daya manusia (TPAK), akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,013.

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh secara tidak langsung dari variabel kapasitas fiskal, investasi dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi/perkembangan nilai PDRB yang ditunjukkan pada **Tabel 2** berikut

Tabel 2

Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung Variabel Kapasitas Fiskal, Investasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Keterangan
X1 → Y1 → Y2	-0.004	Tidak Signifikan
X2 → Y1 → Y2	6.181	Signifikan
X3 → Y1 → Y2	0.118	Signifikan

Sumber: Data diolah dengan Amos

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga hubungan secara tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tiga hubungan variabel tersebut hanya satu yang tidak memiliki pengaruh.

Pertama, pengaruh tidak langsung kapasitas fiskal terhadap ketimpangan wilayah menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0.004 dan nilai P-value sebesar 0.739 yang artinya Rasio PAD terhadap Total Pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan wilayah menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 6.181 dan nilai P-value sebesar 0.000 yang artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini berarti bahwa setiap 1 kenaikan investasi maka akan meningkatkan ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 6.181.

Ketiga, pengaruh tidak langsung sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0.181 dan nilai P-value sebesar 0.000 yang berarti investasi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan

wilayah. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen investasi maka akan menaikkan ketimpangan wilayah sebesar 0.118.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis data di atas, selanjutnya dilakukan pembahasan pengaruh kapasitas fiskal, investasi, dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hasil analisis dan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi yang diperoleh, kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal (Rasio PAD terhadap total pendapatan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh kapasitas fiskal (Rasio PAD terhadap total pendapatan) terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh dari pengaruh kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang kemudian diteruskan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah. Dimana, hasil kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena walaupun dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya berfokus dengan perundangan terkait dengan pajak dan retribusi serta belum memaksimalkannya guna untuk membiayai pembangunan di daerahnya terhadap peningkatan produktivitas masyarakat di daerahnya serta belum mampu memanfaatkannya untuk lebih menggali potensi-potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznets (Todaro, 2013). dimana Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan cenderung memburuk, kemudian pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan ketimpangan wilayah akan menurun dengan signifikan. Hubungan pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan

terhadap ketimpangan wilayah terjadi dikarenakan adanya perbedaan potensi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemerintah provinsi ini hanya lebih memerhatikan kabupaten/kota yang memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja dan tidak berfokus pada pemerataan wilayahnya. Sehingga, ketimpangan yang terjadi tentunya akan semakin besar adanya.

Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi yang diperoleh, investasi berdasarkan pada nilai pembentukan tetap modal bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut didapatkan melalui adanya hubungan positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Adanya kenaikan investasi yang dihitung menggunakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tentunya sejalan dengan teori Harrod-Dommar mengenai peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana keduanya menyatakan bahwa untuk mempertahankan perkembangan ekonomi dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa ditingkatkan agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock), dimana peningkatan stok modal tersebut akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun secara tidak langsung dapat meningkatkan ketimpangan wilayah. Hal ini terjadi dikarenakan investasi belum merata di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan investasi hanya berfokus pada suatu daerah yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi secara besar, sehingga daerah tertinggal akan tetap tertinggal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh besar hanya pada daerah yang memiliki investasi yang besar juga, maka hal tersebut akan menyebabkan ketimpangan wilayah akan semakin melebar.

Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi yang diperoleh, sumber daya manusia yang dihitung dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut didapatkan melalui adanya hubungan positif antara sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya meningkatnya sumber daya manusia, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan bahwa banyaknya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Hal ini pun sejalan dengan teori pertumbuhan (Samuleson dan Nordhaus, 2010) dimana para ekonom menemukan terdapat empat roda yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya ialah sumber daya manusia yang meliputi adanya persediaan tenaga kerja.

Besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan berdampak positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan akan tetapi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak mampu menurunkan ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan. Biasanya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi hanya berpusat di wilayah tertentu khususnya wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Hal ini tentunya akan mendorong terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap daerah. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah ini selanjutnya akan menciptakan gap atau ketimpangan di antara daerah-daerah tersebut.

PENUTUP

Kapasitas fiskal yang diukur dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan tidak akan memberikan pengaruh terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

Variabel investasi yang diukur dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini

tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini karena ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini karena ditemukan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah berpengaruh positif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penelitian ini, diperlukan adanya upaya mendorong potensi pajak dan retribusi daerah agar penerimaan daerah bisa ditingkatkan. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta juga dapat membantu membiayai program-program pemerintah yang berkaitan dengan penurunan ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus menciptakan iklim investasi yang kondusif mengingat investasi menjadi salah satu penunjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan memberikan dampak terhadap masalah ketimpangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga diharapkan dapat terus mendorong sumber daya manusia menjadi lebih baik melalui kebijakan berupa pemberian pelatihan dan pendidikan agar nantinya masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan perwujudan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan dalam mengentaskan masalah ketimpangan wilayah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dalam menyusun kebijakan mengenai pembangunan wilayah dan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, hendaknya difokuskan dan dimanfaatkan untuk peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap potensi daerah, sehingga kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bisa bergandengan dan diikuti dengan aspek pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan.

Peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain di luar penelitian ini yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan memperpanjang periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati keadaan maupun fenomena sesungguhnya.

REFERENSI

- [1] A I Anwar et al 2020. Impact of credit on agriculture and industrial processing. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 473(1), 012005
- [2] A I Anwar et al., 2020. The allocation of special autonomy funds and their impact on regional economic inequality in Papua Province. OP Conference Series: Earth and Environmental Science. 473(1), 012031
- [3] A I Anwar et al., 2020. The Role of Green Marketing and Promotion of Green Energy Bonds to Reduce Carbon Emissions in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*. 13(5), pp. 73–82
- [4] A I Anwar et al., 2023. Financial Development and Environmental Degradation: Promoting Low-Carbon Competitiveness in E-7 Economies' Industries. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*. 2350006
- [5] A I Anwar et al., 2024. The impact of socioeconomic variables on financial inclusion in Asian countries: A comparative study, 2010–2022. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. 8(1), 2857
- [6] Abdul Hamid Paddu, I. T. A. R. N. D. S. S. F. D. M. Z. S. D. S., 2024. Interlinkages of Fiscal Decentralization, Financial Development, and Carbon Emissions: The Underlying Significance of Natural Resources. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), pp. 377-390.
- [7] Agussalim, Zulkifli A, Nasry Noor N, Ansariadi, Stang, Riskiyani S. Risk Factor Analysis of Stunt-ing in Children Aged 6-23 Months in Tanralili District, Maros Regency, Indonesia. *Natl J Community Med* 2024;15(7):559-565. DOI: 10.55489/njcm.150720244014
- [8] Alfons, Marlyn E., Nursini., Fatmawati., R, Abd Rahman. (2024). *Government*
- [9] Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus*, M. S. M. A. M. A. Y., 2024. Climate Change and Cyclical Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(5), pp. 125-130.
- [10] Anon., 2024. Assessing the implications of imported electricity equipment in Indonesia: A comprehensive ECM approach for short-term and long-term analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 2024, 8(8), 5926, 8(8), p. 5926.
- [11] Anwar AI, Sabbar SD, Saifulloh NI, et al. (2024). The impact of socioeconomic variables on financial inclusion in Asian countries: A comparative study, 2010–2022. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. 8(1): 2857. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i1.285>
- [12] Azhari, Muhammad, dkk. (2020). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap*

- [13] Badan Pusat Statistika. (2022). *Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.* <https://sulsel.bps.go.id/indikator/52/1668/1/-seri-2010-laju-pertumbuhankabupaten-kota-menurut-lapangan-usaha.html>
- [14] *Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. Journal of Distribution Science. Volume 22 (8), 17-27.* <https://doi.org/10.15722/jds.22.08.202408.17>
- [15] Djam'an, F., 2021. Identification of the potential and palm sap characteristics for palm sugar business development in Lombo Village, Sidrap Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 886(1), 012055.
- [16] Djam'an, F., 2021. Potential analysis of palm sugar industry development in Lombo Village, Sidrap District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 886(1), 012074.
- [17] Djam'an, F., 2023. Development of strategic plan for palm sugar agro-industry using SWOT analysis and business model canvas: Case study in Lombo Village, Sidrap District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 1230(1), 012002.
- [18] Djam'an, F., 2024. Assessing the implications of imported electricity equipment in Indonesia: A comprehensive ECM approach for short-term and long-term analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development* *This link is disabled.*, pp. 8(8), 5926..
- [19] doi:10.1088/1755-1315/473/1/012005
- [20] Dr. Munawwarah S. Mubarak, S. M., 14(5), pp. 125–130. Climate Change and Cyclical Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- [21] Emily Nur Saidy, M. A. S. F. S. U. N., 2024. Determinant of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), pp. 17-27.
- [22] Emily Nur Saidy, M. A. S. F. S. U. N., 2024. Determinant of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), pp. 17-27.
- [23] Emily Nur Saidy, Muhammad Amri, Sanusi Fattah, Sri Undai Nurbayani;, 2024. Determinant of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in south Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), pp. 17-27.
- [24] *Expenditure, Human Development Index and Regional Inequality in Indonesia. Journal of Ecohumanism, Volume 3 (7), 4810-4820.*

- [25] Fatmawati, L. R. W. a. A. T., 2020. Utilization of probiotic bacteria as an effort to handle liquid waste from the palm oil processing industry. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 473.
- [26] Fatmawati., H. B. P. S. D. S. S. N., 2022. Personal Economic Indicator and Its Distribution on Household Consumption Level. *Korean Distribution Science Association*, 20(4), pp. 1738-3110.
- [27] Fatmawati., H. B. P. S. D. S. S. N., 2022. Personal Economic Indicator and Its Distribution on Household Consumption Level. *Korean Distribution Science Association*, 20(4), pp. 1738-3110.
- [28] Fatmawati., Faisal F., Aflaha, I., Amin, N., Baharuddin. 2021. Agro-climate and intensity of the disease rot of bacteria in two planting seasons. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 681 012069
- [29] Fattah, S., 2016. Determinants of educated unemployment: Empirical evidence from South Sulawesi Indonesia. *International Journal of Economic Research*, pp. 13(8), pp. 3445–3453.
- [30] Fattah, S., 2017. The effect of minimum wages, inflation rate, human resources quality, economic growth toward productivity of labor force and its implication to education unemployment rate in South Sulawesi-Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, p. Journal of Applied Economic Sciences.
- [31] Fattah, S., 2024. The role of green intelligence in promoting destination social accountability and eco-friendly behavior of visitors: An empirical investigation of tourist site. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, pp. 8(8), 5908.
- [32] Fitrianti, R., 2015. Does government expenditure crowds out the private domestic investment? Empirical evidence of Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, pp. Volume X, Issue 5 (35), Fall 2015.
- [33] Gita Susanti., A. A. S. S. S. I. M. I. N., 2023. Strengthening Public Organization Capacity of Fisherman Empowerment Programs in South Fisherman Empowerment Programs in South Sulawesi. *E3S Web of Conferences 440, 01007 (2023)*.
- [34] Gita Susanti., A. A. S. S. S. I. M. I. N., 2023. Strengthening Public Organization Capacity of Fisherman Empowerment Programs in South Fisherman Empowerment Programs in South Sulawesi. *E3S Web of Conferences 440, 01007 (2023)*.
- [35] Guohua Liu, M. A. K. A. H. a. U., 2022. Financial Development and Environmental Degradation: Promoting Low-Carbon Competitiveness in E7 Economies' Industries. *Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(23), 16336*;

- [36] Harahap, Siti Holijah. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(3), 1503-1512.*
- [37] <https://doi.org/10.3390/ijerph192316336>, 19(23).
- [38] Idris, Amiruddin. (2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.*
- [39] Iswandi, S., Yunus, R., Agussalim. 2020. The implementation of law number 6 the year 2014 concerning with villages in gender-responsive development planning in Uluere District, Bantaeng Regency. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 473 (2020) 012091* doi:10.1088/1755-1315/473/1/012091
- [40] Kaimuddin *et al* 2021. Growth and production of indigenous Katokkon chilies of Toraja (*Capsicum chinense jacq*) in various organic Tithonia compost compositions. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 870 012045 DOI:10.1088/1755-1315/870/1/012045
- [41] Kasnaeny Karim, Muhammad Jibril Tajibu , Akhmad Akhmad. 2021. Determination of Consumer Switching Barriers to Use Prepaid Electricity Systems in the Household Sector in Makassar, Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2021, 11(1), 193-199.
- [42] Kasneny Karim, G. B. I. Z. A. U. M. J. T. d. J., 2022. consumers' awareness and loyalty in indonesia banking sector: does emotional bonding effect matters?. *Journal of Islamic Marketing. 14(10), pp. 2668–2686.*
- [43] Madris, 2018. Effects of economic growth, regional development patterns and types of ports on supply chain in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(10), p. 112–115.
- [44] Madris, 2019. The potential of ecotourism development through community involvement to enhance tourism destination performance in Tana Toraja (An implementation of ecotourism concepts on Banua Tongkonan). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 235(1), 012031.
- [45] Madris, 2024. Leadership in Higher Education in Indonesia: The Case of the University of West Sulawesi | Liderazgo en la Educación Superior en Indonesia: El Caso de la Universidad de Sulawesi Occidental. *UCJC Business and Society Review*, 21(80), p. 128–159.
- [46] Madris. Building The Competitiveness Of Makassar Industrial Park As Center For Economic Growth In South Sulawesi. 2021. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 25(Special Issue 4), pp. 1–11*

- [47] Mangilep, M Agung Ady., 2022. Analysis of Financial Inclusion and Its Impact on Poverty in South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering*, p. Vol. 7 No. 2.
- [48] Mangilep, M. A. A., 2015. Findings in Interviews on Motivation of Farmers for the Improvement of Paddy Rice Quality and the Implementation of New Methods of Paddy Rice Production in the Chiba Prefecture. *千葉大学人文社会科学研究*, pp. 31, 116-123.
- [49] Mangilep, M. A. A., 2015. Socioeconomic Problems on Adoption of New Technologies for Production of Paddy Rice by Farmers in Upland Areas of South Sulawesi. *千葉大学人文社会科学研究*, pp. 30, 150-157.
- [50] Mangilep, M. A. A., 2017. The Importance of Paddy Rice Production for The Agricultural Communities in The Highland of South Sulawesi. *The 7th Indonesia Japan Joint Scientific Symposium.*, pp. 270-278.
- [51] Mangilep, M. A. A., 2017. The New Technology and Purposes of Paddy Rice Production In The Upland of South Sulawesi. *2nd International Conference on Accounting, Management, and Economics 2017 (ICAME 2017)*, pp. 244-251.
- [52] Mangilep, M. A. A., 2019. Sectoral ICORs of South Sulawesi Province. *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018*, pp. 713-719.
- [53] Mangilep, M. A. A., 2019. The Economic Development of Bau-Bau City and The Strengths of its Hinterland. *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018*, pp. 616-623.
- [54] Mangilep, M. A. A., 2019. The Effect of Economic Growth, Microfinance Institution, and Micro and Small Enterprises to Income Inequality in South Sulawesi. *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics*, pp. 543-546.
- [55] Mangilep, M. A. A., 2021. Businesswomen and the Income Generating Activity in Buton Regency of Indonesia. *psychology and education*, pp. 58(1): 60-66.
- [56] Mangilep, M. A. A., 2021. Is the Foreign Investment Matter for the Agricultural Export?. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 921, 012037.
- [57] Mangilep, M. A. A., 2023. Community Preferences on The Development of Waste Bank in Makassar City. *Hasanuddin Review on Sustainable Development*.
- [58] Mangilep, M. A. A., 2024. Handling security and terrorism issues in developing the tourism sector through ecotourism policies on small islands in Makassar. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, pp. Vol 8, Issue 14.

- [59] Mangilep, M. A. A., 2024. The Development Strategy of Freshwater Lobster Business as a Coastal Economic Strengthenener. *8th International Conference on Accounting, Management, and Economics (ICAME 2023)*, pp. 903-913.
- [60] Mirah, Meyvi Rine, dkk. (2020). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(1), 85-100.
- [61] Mubarak, M. S., 2024. Household Durable Goods Spending in Urban Areas: A New Keynesian Micro Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, pp. 14(6), pp. 352–356.
- [62] Muhammad Jibril Tajibu et al., 2019. The Impact of Fuel Oil Price Fluctuations on Indonesia's Macro Economic Condition. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2019, 9(2), 277-282. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7470>
- [63] Muhammad Jibril Tajibu, K. K. R. F. I. T. A. R. S. U. N., 2021. Consumer Behavior in Using Prepaid Electricity Systems in the Covid-19 Pandemic Period in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(5), pp. 172-177.
- [64] Muhlis, F. I. R. a. S., 2019. Application of remote sensing and GIS for temporal dynamics of land use and land cover changes in 2013-2018 for watershed protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 486.
- [65] Muhlis., Fatmawati., Rahim, I., Syamsia. 2021. Evaluation of the Accuracy of Spatial Data in Detecting the Rate of Land Change in Sinjai District. *J. Phys.: Conf. Ser.* 1899 012096
- [66] Nur Dwiana Sari Saudi, I. T. A. R. A. H. P. G. A. F. D. S. D. S., 2024. Carbon Neutrality and Sustainable Development: An Empirical Study of Indonesia's Renewable Energy Adoption. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), pp. 526-537.
- [67] Nurbayani, S. U., 2020. Analysis effect the price of the demand for chicken eggs in Biringkanaya district. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 473(1), 012024.
- [68] Nursini, 2020. Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, pp. 7(1), pp. 153–166.
- [69] Nursini, N. & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the contex of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(1), 270-285. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-1/16
- [70] Oktaviana, A.A., Joannes-B, R., Hakim, B. *et al.* Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago. *Nature* **631**, 814–818 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07541-7>

- [71] Paddu, A., 2017. The Influence of Decentralization with Autonomy Power, Decentralization with Authority Power, Factor Mobility, the Construction Cost Index, and Inflation Rate Toward Labor Absorption Rate. Implications toward Regional Inequity in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Fall 5(51): 1433–1442.*, 5(51), pp. 1433-1442.
- [72] Paddu, A., 2017. The Influence of Decentralization with Autonomy Power, Decentralization with Authority Power, Factor Mobility, the Construction Cost Index, and Inflation Rate Toward Labor Absorption Rate. Implications toward Regional Inequity in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Fall 5(51): 1433–1442.*, 5(51), pp. 1433-1442.
- [73] *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia, 5(1), 81-94.*
- [74] Rahman Razak and Wahyoe Soedarmono, (2023) "Revisiting the finance-growth nexus: Global evidence", *Economics Bulletin*, Volume 43, Issue 3, pages 1214-1224
- [75] Rahmatia, 2018. Increasing inpatient service quality of using Quality Function Deployment method in Nene Mallomo Hospital of Sidrap Regency, Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, pp. 9(4), pp. 287–291.
- [76] Rahmatia, 2019. Planned behaviour theory for the science agency: The role of youth for sustainable waste management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 343(1), 012101.
- [77] Rahmatia, 2020. Analysis of ability and willingness to pay patients in psychiatric clinics (Special hospital case study in maluku province). *Medico-Legal Update*, pp. 20(3), pp. 926–931.
- [78] Rahmatia, 2020. Attitude of health workers to the utilization of immigrant patients health services in Tamalanrea health center. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, pp. 8(T2), pp. 32–35.
- [79] Rahmatia, 2020. Synergy between student and communities to manage waste in Makassar city Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, pp. 473(1), 012071.
- [80] Rahmatia, 2020. The implementation of law number 6 the year 2014 concerning with villages in gender-responsive development planning in Uluere District, Bantaeng Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [This link is disabled.](#), pp. 473(1), 012091.

- [81] Rahmatia, 2020. The influence of individual characteristics on the performance of nutrition program in ambon city public health center. *Medico-Legal Update*, pp. 20(3), pp. 926–931.
- [82] Rahmatia, 2023. Potential fraud and its' prevention in the implementation of national health insurance at Dadi Regional Hospital. *International Journal of Public Health Science*, pp. 12(3), pp. 1040–1047.
- [83] Rahmatia, 2024. Digital-Based Sustainable Tourism Security through Pentahelix Collaboration in Samalona Island, Makassar, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, pp. 3(4), pp. 2227–2237.
- [84] Rahmatia., 2024. Analysis of the Inpatient Medical Records Management System at Sandi Karsa Hospital Makassar. *Pharmacognosy Journal*, pp. 16(3), pp. 650–655.
- [85] Rauf, M. S., 2016. Improving Indonesian logistics performance with using six sigma, DMAIC and integration Process. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, pp. 2857-2858.
- [86] Razak, A.R., Fernandes, A.A.R. and Saifullah, N.I. (2023) 'Moderation of village funds and mediation of agricultural sector growth on poverty in rural areas', *Int. J. Economics and Business Research*, Vol. 26, No. 4, pp.463–483.
- [87] Razak, Abd Rahman. (2009). *Esensi Pembangunan Ekonomi Daerah. Cetakan Pertama. Makassar: Nala Cipta Litera.*
- [88] REVIANE, I. T. A., 2017. The Mediating Effect of Inflation on the Effect of Tradeliberalization and Government Spending towards Welfare. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Summer, 4(50): 1038-1047.*, XII(50), pp. 1038-1047.
- [89] Ririhena, Samel Watina dan Romualdus Turu Putra Maro. (2018). *Effects of Investment (PMTB) on Economic Growth and Employment in Papua Province. Atlantis Press, Vol. 226, 1407-1410.*
- [90] Rori, Chindy Febry. Dkk. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001/2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 243-254.*
- [91] Sabbar Dahham Sabbar, H. A. M. A. R. K. M. N. A. M. M. M. A. I. A., 2023. The Role of Green Marketing and Promotion of Green Energy Bonds to Reduce Carbon Emissions in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2023, 13(5), 73-82., 13(5), pp. 73-82.
- [92] Sabbar Dahham Sabbar, H. A. M. A. R. K. M. N. A. M. M. M. A. I. A., 2023. The Role of Green Marketing and Promotion of Green Energy Bonds to Reduce Carbon Emissions in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2023, 13(5), 73-82., 13(5), pp. 73-82.

- [93] Saidy, Emily N., Amri, M., Fattah, S., Nurbayani, Sri U. (2024). *Determinants of*
- [94] Samir, S., 2019. Impact of new seed varieties programme on the welfare of rice farmers in Indonesia: A propensity score matching approach. *Journal of Agricultural Extension*, 23(4), pp. 144-156.
- [95] Samir, S., 2024. Formulate an incentive model to involve communities' industries in coastal waste management, Makassar, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, pp. 8(3), 3102.
- [96] Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (2010). *Economics. Nineteenth Edition. Singapore: McGraw-Hill Education.*
- [97] Saudi, N. D. S., 2019. Social status relationship to purchase of tedong bonga for the Community Toraja Tribes. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [This link is disabled.](#), pp. 247(1), 012060.
- [98] Saudi, N. D. S., 2022. Community Perception of Waste Pollution from Bolu Animal Market in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, pp. 10(6), pp. 749–754.
- [99] Saudi, N. D. S., 2024. Pollution Levels of Pig Waste From the Bolu Animal Market in Terms of Public Perception. *AIP Conference Proceedings*, pp. 3098(1), 040029.
- [100] Siswadharma, A. B., 2021. The Determinants Of Consumption Expenditure Of Female Worker In Informal Sector In Makassar. *Academy of Strategic Management Journal*, pp. 20(SpecialIssue2), pp. 1–8.
- [101] Suhab, S., 2020. New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries. *Public Money and Management*, pp. 40(2), pp. 160–163.
- [102] Suhab, S., 2021. Impact of the Covid-19 Pandemic on Rice Farming Planning in Indramayu District, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [This link is disabled.](#), pp. 1012(1), 012074.
- [103] Suhab, S., 2021. Implementation and constraints of of the use of farmer's card in increasing the effectiveness of subsidized fertilizer distribution in Ciamis and Pati District. *E3S Web of Conferences* [This link is disabled.](#), pp. 316, 02026.
- [104] Suhab, S., 2022. Consistency of Central and Regional Planning in the Agricultural Sectors and the Factors Affecting It in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, pp. 14(23), 16297.
- [105] Suhab, S., 2024. New development: 'Auditor opinions for sale'—when privatization meets the cultural ecology of corruption. *Public Money and Management*.

- [106] Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi Modern. Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [107] T Darmi1*, S. R. P. I. S. A. I. M. M., 2023. Analysis of Village Government Institutional Capacity in Strengthening Environmental Resilliance. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, p. 1268.
- [108] Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2012). *Economic Development (Edisi Kesebelas)*. Pearson High Ered..
- [109] Tofan, Mochamad. (2019). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017)*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Universitas Brawijaya.
- [110] Vaulina, Sisca dan Limetry Liana. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau*. *Jurnal Dinamika Pertanian, Volume XXX (3)*, 261-272.
- [111] Yuliani, Nur., Nursini., Madris., Agussalim. 2022. The Impact of People's Business Credit Program, Minimum Wage, and Investment on Indonesian Poverty. *FWU Journal of Social Sciences, Summer 2022*, Vol. 16, No. 2, 125-141 DOI: <http://doi.org/10.51709/19951272/Summer2022/9>
- [112] Yusuf, Arief Anshory. (2018). *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. Bandung: Unpad Press.